



DISDIK PESSEL

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2025



Dinas Pendidikan

Tahun 2026



<https://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>



(0756) 21502



@perencanaan@DA

KATA PENGANTAR



Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv atas laporan kinerja instansi pemerintah , yang merupakan tindak lanjut dari TAP

Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKjIP) ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Painan, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,

SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19701107 199702 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi dan APBN) Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (*good governace*).

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah laporan kinerja tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Dalam mewujudkan visi

dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 2 misi diantaranya misi kelima : **“Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing”** dengan tujuan yaitu : **“Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas** dalam pencapaian Indikator Kinerja : indeks literasi, indeks numerasi dan indeks karakter diri. Misi keempat : **“Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan”** dengan tujuan mewujudkan pengembangan pembangunan budaya untuk mendorong sektor pariwisata dalam mendorong pencapaian indikator jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan (Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021-2026 urusan pariwisata.

Untuk mewujudkan itu semua ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada Tabel.1.1 berikut :

Tabel.1.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, dan berdaya saing	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (85)	A (80,04)*	94,16
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	96,00	91,00	94,79
		Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,59	13,38	98,45
			Rata- Rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	9,04	9,06	102,22
		Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional (orang)	Orang	3	5	166,67
			Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional	Orang	5	5	100,00

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
			(orang)				
2	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata	%	77	75*	97,40
			Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata	%	100	100*	100,00
Rata-rata capaian (%)							106,46

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Disdikbud , Inspektorat, Bapedalitbang dan BPS Pusat Tahun 2025

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang semua capaian sasaran strategis dapat lebih maksimal.

Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada tahun berikutnya serta sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan.



SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19701107 199702 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	1
Ikhtisar Eksekutif.....	2
Daftar Isi.....	5
Daftar Tabel.....	6
Daftar Grafik.....	8
Daftar Gambar.....	9
BAB I Pendahuluan.....	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Maksud dan Tujuan.....	11
1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	12
1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama.....	20
1.5 Landasan Hukum.....	23
1.6 Sistematika Penyusunan.....	24
BAB II Perencanaan Kinerja.....	26
2.1. Rencana Strategis.....	26
2.2. Rencana Kinerja.....	27
2.3. Perjanjian Kinerja.....	29
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	31
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja Tahun 2025.....	31
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	31
3.3 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.....	33
3.4 Realisasi Anggaran.....	69
BAB IV Penutup.....	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	72
Daftar Lampiran.....	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	3
Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	19
Tabel 1.3. Data Pegawai Berdasarkan Eselon.....	19
Tabel 1.4. Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	19
Tabel 1.5. Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	19
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.....	28
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel 2.3. Anggaran Akhir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	30
Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025.....	31
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.....	32
Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025.....	34
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	35
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	35
Tabel 3.6. Perbandingan Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025.....	36
Tabel 3.7. Analisis atas Penggunaan Sumber Daya.....	40
Tabel 3.8. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025.....	43
Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	46
Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	46
Tabel 3.11. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya.....	47

Tabel 3.12. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Pendidikan Tahun 2025.....	50
Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	51
Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	52
Tabel 3.15. Perbandingan Jumlah Guru Berprestasi Tingkat Provinsi atau Nasional dan Jumlah Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi atau Nasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025.....	53
Tabel 3.16. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia Tahun 2022-2025.....	54
Tabel 3.17. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia Tahun 2022-2025.....	55
Tabel 3.18. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya.....	57
Tabel 3.19. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Pendidikan Tahun 2025.....	60
Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	61
Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	62
Tabel 3.22. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya.....	63
Tabel 3.23. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatny Pemajuan Kebudayaan Daerah Tahun 2025.....	65
Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	66
Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	67
Tabel 3.26. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya.....	68
Tabel 3.27. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025.....	70

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2023-2025.....	54
Grafik 3.2. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2023-2025.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	14
Gambar 3.1. Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Sekolah.....	37
Gambar 3.2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.....	37
Gambar 3.3. Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan Bagian Organisasi.....	38
Gambar 3.4. Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2024.....	39
Gambar 3.5. Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.....	39
Gambar 3.6. Tampilan Website Aplikasi Pronasa.....	44
Gambar 3.7. Tampilan Website Aplikasi Siguru.....	45
Gambar 3.8. Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2025.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan ikhtisar yang menyajikan penjelasan secara ringkas, sistematis, dan komprehensif mengenai capaian kinerja instansi selama satu periode pelaporan. LKjIP ini memuat informasi tentang tingkat pencapaian sasaran, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan LKjIP didasarkan pada rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan strategis dan perencanaan tahunan perangkat daerah. Dengan demikian, seluruh capaian kinerja yang dilaporkan merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah dirumuskan. Selain itu, LKjIP disusun dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Belanja Daerah (APBD). Melalui LKjIP ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan berupaya mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan pengembangan kebudayaan di daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen utama pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. LKjIP berfungsi untuk menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga dapat menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil yang dicapai dalam satu periode pelaporan. Dalam kerangka SAKIP, LKjIP juga berperan sebagai alat evaluasi kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam LKjIP menjadi bahan penting bagi pimpinan dalam melakukan pengendalian, pengawasan, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pelaksanaan SAKIP dapat berjalan secara

sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

LKjIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan memiliki keterkaitan yang erat dengan proses perencanaan dan penganggaran. Secara normatif, LKjIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan, seperti RPJMD, Renstra, dan Rencana Kerja Tahunan. Dengan demikian, capaian kinerja yang disajikan dalam LKjIP mencerminkan tingkat keberhasilan instansi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Dalam konteks penganggaran, LKjIP berfungsi sebagai instrumen evaluatif terhadap pemanfaatan sumber daya, khususnya anggaran, dalam mendukung pencapaian kinerja. Secara umum, keterkaitan ini menunjukkan bahwa setiap alokasi anggaran yang dituangkan dalam APBN atau APBD harus selaras dengan sasaran kinerja yang telah direncanakan dan diukur melalui indikator kinerja. Hasil evaluasi kinerja dalam LKjIP selanjutnya menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya, sehingga tercipta siklus manajemen kinerja yang berkesinambungan, terukur, dan akuntabel sesuai prinsip SAKIP.

1.2. Maksud dan Tujuan

A. Maksud Penyusunan LKj

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKjIP) OPD Tahun Pelaporan adalah:

- Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan OPD;
- Menyajikan kinerja OPD secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Menjadi wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sasaran kinerja pada tahun pelaporan.

B. Tujuan Penyusunan LKj

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) OPD Tahun Pelaporan meliputi:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja OPD kepada pihak eksternal;
- Melaporkan capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun pelaporan;

- Capaian kinerja yang dilaporkan mengacu pada tingkat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis OPD pada tahun pelaporan

2. Aspek Manajemen Kinerja

- Sebagai sarana evaluasi kinerja bagi kepentingan internal organisasi;
- Digunakan oleh manajemen OPD untuk menilai pencapaian kinerja pada tahun pelaporan;
- Menjadi dasar bagi upaya perbaikan kinerja OPD di masa mendatang.

1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas pokok Dinas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai evaluasi kinerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mengevaluasi penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan urusan pendidikan dan kebudayaan Tahun Anggaran 2025. Penyusunan evaluasi kinerja ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan, tingkat capaian pelaksanaan program/kegiatan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang -undangan.

a. Struktur Organisasi

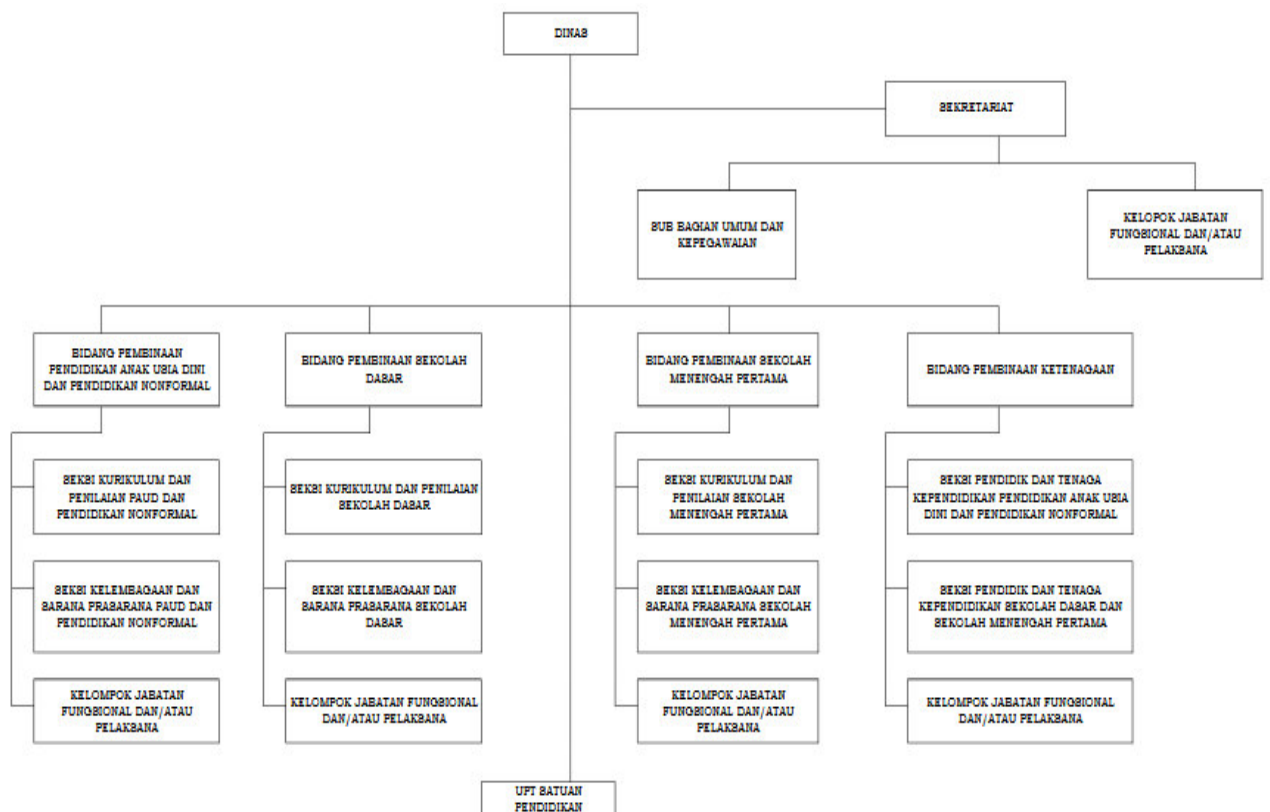
Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

- a) Sekretariat;
- b) Bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- c) Bidang Pembinaan SD;
- d) Bidang Pembinaan SMP;
- e) Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- f) Bidang Kebudayaan;
- g) UPTD.

1. Sekretariat, terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian.
2. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Nonformal; dan
 - b) Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal.
3. Bidang Pembinaan SD, terdiri atas :
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar; dan
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana prasarana Sekolah Dasar.
4. Bidang Pembinaan SMP, terdiri atas:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama.
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:
 - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Nonformal; dan
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP.
6. Bidang Kebudayaan;
7. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
8. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

9. Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris;
10. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang;
11. Pada Sekretariat dan bidang terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator;
12. UPTD dipimpin oleh kepala sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



BUPATI PESISIR SELATAN,

 HENDRAJONI

b. Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. pengelolaan pendidikan dasar;
2. pengelolaan PAUD dan pendidikan nonformal;
3. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal;
4. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
5. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
7. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah;
8. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut tugas dan fungsi 5 bidang yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Sekretariat
 - Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
 - Pengelolaan data dan informasi di bidang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
 - Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
 - Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas;
 - Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan dan nonformal;
 - Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan, meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan

kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan PAUD kerja sama, SD kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama;

- koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
- koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
- pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Pembinaan PAUD

- penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan Nonformal;
- penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Pembinaan SD

- penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
- pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
- penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD;
- penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD;
- penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
- penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Daerah;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Bidang SMP

- penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
- pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
- penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMP;
- penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SMP;
- penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;

- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundangundangan.

5. Bidang Ketenagaan

- penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Nonformal;
- penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Nonformal;
- penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Nonformal;
- penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Nonformal;
- penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
- penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Nonformal;
- pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Nonformal; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sumber Daya Manusia

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yaitu ASN dan Non ASN, dimana jumlah total ASN dan Non ASN per 31 Desember 2025 adalah 181 orang, yang terdiri atas :

- a) PNS sebanyak 53 orang yang terdiri atas 33 orang laki-laki dan 20 orang perempuan;
- b) PPPK sebanyak 13 orang yang terdiri atas 7 orang laki-laki dan 6 orang

perempuan;

- c) Non ASN sebanyak 115 orang yang terdiri atas 52 orang laki-laki dan 63 orang perempuan.

Jumlah Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 181 orang, berikut disajikan data pegawai berdasarkan jabatan, eselon, kuaifikasi pendidikan dan golongan seperti tabel di bawah :

Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Pegawai	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	Struktural	10	6	16	8,84
2.	Fungsional Tertentu	10	9	19	10,50
3.	Fungsional Umum	13	5	18	9,94
4.	PPPK	7	6	13	7,18
5.	Non ASN	52	63	115	63,54
	Jumlah	92	89	181	100,00

Sumber Data : Disdikbud Tahun 2025

Tabel 1.3. Data Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	0	1	0,55
2.	Eselon III	4	2	6	3,31
3.	Eselon IV	5	4	9	4,97
4.	Fungsional Tertentu	10	9	19	10,50
5.	Fungsional Umum (Staf)	13	5	18	9,94
6.	PPPK	7	6	13	7,18
7.	Non ASN	52	63	115	63,54
	Jumlah	92	89	181	100,00

Sumber Data : Disdikbud Tahun 2025

Tabel 1.4. Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Strata 2 (S2)	12	9	21	11,60
2	Strata 1 (S1)	47	54	101	55,80
3	Diploma 3 (D3)	1	10	11	6,08
4	SLTA	32	16	48	26,52
	Jumlah	92	89	181	100,00

Sumber Data : Disdikbud Tahun 2025

Tabel 1.5. Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	18	10	28	15,47
2	Golongan III	12	8	20	11,05
3	Golongan II	62	71	133	73,48

No	Golongan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
	Jumlah	92	89	181	100

Sumber Data : Disdikbud Tahun 2025

1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

a) Aspek Strategi Organisasi

Pelaksanaan pendidikan perlu memperhatikan sisi aspek kualitatif maupun kuantitatif dari perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- b. Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan;
- c. Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal;
- d. Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Pelaksanaan pengendalian perizinan pendidikan;
- f. Budaya ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) sebagai jati diri masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketercapaian Aspek Strategis Organisasi dari sisi kualitatif maupun kuantitatif dari perencanaan pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan tidak lepas dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pesisir Selatan adalah : "Pesisir Selatan Daerah Maju, Sejahtera Dengan Basis Ekonomi Pangan dan Pariwisata".

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjalankan dua urusan terkait pendidikan dan kebudayaan. Urusan pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar dalam pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini Dinas bertugas terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terhadap pendidikan dasar (PAUD, SD, dan SMP, serta Kesetaraan). Disamping itu juga membantu mewujudkan satu misi kepala daerah misi ke 5 yaitu : **"Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing"**.

Urusan kebudayaan membantu dalam mewujudkan meningkatkan peran objek wisata dalam pembangunan ekonomi daerah mendukung kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pencapaian misi ke 4 yaitu : **"Mewujudkan Kabupaten pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan"**.

b) Permasalahan Utama (Isu Strategis) Yang Sedang Dihadapi

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis.

Pencapaian tujuan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang membantu Kepala Daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a) Distribusi tenaga pendidik yang belum merata dan proporsional sesuai kebutuhan bidang studi (SMP);
- b) Kelebihan jumlah guru berstatus Non-ASN di satuan pendidikan yang tidak sebanding dengan kebutuhan riil sekolah, sehingga berdampak pada ketidakefisienan pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.
- c) Kondisi sarana dan prasarna sekolah masih ada yang kurang maupun dalam kondisi rusak;
- d) Keterjangkauan akses masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan;
- e) Keterbatasan akses internet di beberapa kecamatan guna mendukung pembelajaran jarak jauh;
- f) Keterbatasan sumber daya dalam mengelola kebudayaan.

Berkaitan dengan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang pendidikan dan pengembangan kebudayaan, isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan

perbincangan, dapat diidentifikasi isu strategi sebagai berikut :

a) Rendahnya Kualitas Pendidikan

Sektor pendidikan di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Memiliki permasalahan dengan rendahnya kualitas hal ini dapat dilihat dari rapor pendidikan. Sehingga ini merupakan masalah yang harus ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

b) Masih Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah

Masih terbatasnya keberlanjutan pendidikan penduduk ke jenjang pendidikan menengah atas. Meskipun capaian rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari 8,81 tahun menjadi 9,06 tahun, kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk baru menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP. Rendahnya transisi lulusan SMP ke SMA/SMK sederajat, faktor ekonomi keluarga, keterbatasan akses satuan pendidikan menengah, serta masih tingginya angka putus sekolah menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Hal ini merupakan masalah yang masih harus ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai wajib belajar sampai 12 tahun setara tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun jika di lihat dari persentase kenaikan angka rata-rata lama sekolah, Kabupaten Pesisir Selatan menempati urutan ke 13 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

c) Masih Rendahnya Harapan Lama Sekolah

Capaian harapan lama sekolah tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 13,38/tahun, dan menempati peringkat 15 dari 19 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Walaupun masih diposisi bawah, tetapi capaian ini sudah meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 13,37/tahun. Hal ini menunjukkan rata-rata harapan masyarakat baru bisa menyelesaikan pendidikan sampai diploma belum mencapai sarjana. Hal ini harus jadi perhatian karena akan menentukan daya saing sumber daya manusia.

d) Masih Rendahnya Pengembangan Kebudayaan

Pembangunan pengembangan kebudayaan masih kurang, sehingga potensi kebudayaan yang ada belum dapat mendukung pengembangan sektor lain misalnya sektor pariwisata, merupakan salah satu tujuan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : mewujudkan pengembangan pembangunan budaya untuk mendorong sektor pariwisata, sehingga kebudayaan dapat dijadikan sumber perekonomian bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan

sekaligus budaya dapat dijadikan ajang promosi daerah ke negara lain.

1.5. Landasan Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- p. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

1.6. Sistematika Penyusunan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
A	Latar Belakang Berisikan tentang dasar-dasar penyusunan dokumen laporan kinerja yang berkaitan dengan latar belakang penyusunan dokumen laporan kinerja;
B	Maksud dan Tujuan Berisikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
C	Dasar Hukum Berisikan tentang dasar-dasar hukum atau peraturan dan perundang-undangan yang dipakai sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan laporan kinerja;
D	Gambaran Umum Perangkat Daerah Berisikan tentang gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
E	Struktur Organisasi Berisikan tentang struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
F	Sumber Daya Manusia Berisikan tentang kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- G Isu Strategis
Berisikan tentang isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - H Sistematika Penulisan
Berisikan tentang isi dan bagian-bagian dalam laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 sehingga memudahkan dalam mendalami penyusunan dokumen laporan kinerja ini;
- BAB II Perencanaan Kinerja
- A Rencana Strategis
Berisikan tentang Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
 - B Perjanjian Kinerja
Berisikan tentang penyajian kinerja Ikhtisar Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025
 - C Indikator Kinerja Utama
Berisikan tentang indikator kinerja utama Pendidikan dan Kebudayaan;
- BAB III Akuntabilitas Kinerja
- A Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja Tahun 2025
Berisikan tentang metode pengukuran kinerja Pendidikan dan Kebudayaan;
 - B Hasil Pengukuran Kinerja dan Tabel Hasil Pengukuran Kinerja
Berisikan tentang hasil pengukuran kinerja dan tabel pengukuran kinerja ;
 - C Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Berisikan tentang capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025;
 - D Akuntabilitas Keuangan
Berisikan tentang anggaran dan realisasi keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025;
- BAB IV Penutup
- A Kesimpulan
Berisikan tentang kesimpulan laporan kinerja tahun 2025;
 - B Saran
Berisikan saran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kedepannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam penyusunan renstra memuat visi dan misi perangkat daerah yang disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah.

Adapun Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan adalah "***Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera Maju dan Bermartabat Di Dukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional***". Untuk mewujudkan visi tersebut didukung oleh enam misi, yaitu:

- a) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
- b) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
- c) Memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;
- d) Mewujudkan Kabupaten pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
- e) Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
- f) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pengelola urusan pendidikan dan kebudayaan adalah misi kelima dan keempat. Tujuan yang ingin dicapai misi kelima adalah "***Terwujudnya Pendidikan Yang Berkualitas***", dengan sasaran : meningkatnya akses layanan bidang pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan.

Urusan kebudayaan mendukung misi keempat dengan tujuan yang ingin dicapai adalah "***Meningkatnya Perekonomian Bidang Pariwisata***", dengan sasaran : meningkatnya kontribusi kekayaan budaya dalam pembangunan pariwisata.

Kebijakan umum pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada sektor pendidikan dan kebudayaan yaitu :

- a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah;
- b) Meningkatnya harapan lama sekolah;
- c) Mewujudkan pesisir selatan religius, sejahtera, cerdas, dan berakhlak (Pasisia Rancak);
- d) Meningkatnya fungsi dan peran lembaga adat dan agama;
- e) Terlaksananya pelestarian nilai-nilai seni dan budaya.

2.2 Rencana Kinerja

Dokumen perencanaan tahunan yang memuat sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu tahun anggaran, sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah.

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mengampu urusan kependidikan dan kebudayaan. Berdasarkan urusan dan program yang diampu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian 2 (dua) misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum pada RPJMD yaitu

misi kelima dan keempat. Urusan pendidikan berada pada misi kelima yaitu :
“Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing”.

Tujuan : **“Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas”**

Sasaran : **“Meningkatkan Pemenuhan 3 Standar Pendidikan Nasional”.**

Urusan Kebudayaan mendukung pencapaian misi keempat yaitu :
“Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan” dengan tujuan mewujudkan pengembangan pembangunan budaya untuk mendorong sektor pariwisata dalam mendorong pencapaian indikator jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan yang merupakan Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021-2026 urusan pariwisata.

Tabel 2.1.
 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Target
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat	A (85)
2	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil Penilaian oleh Kemendagri melalui Aplikasi Inovation Government Award	96
3	Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Perbandingan antara jumlah penduduk usia 7 sampai 18 tahun yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia 7 sampa 18 tahun pada tahun 2025	13,59 Tahun
		Rata- Rata Lama Sekolah	Perbandingan antara lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Jumlah penduduk usia 25 tahun ke keatas pada Tahun 2025	9,04 Tahun
4	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional	Jumlah guru yang memperoleh prestasi tingkat provinsi atau nasional	3 orang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Target
		Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional	Jumlah siswa yang memperoleh prestasi tingkat provinsi atau nasional	5 orang
5	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata	Perbandingan antara jumlah cagar budaya yang di ajukan untuk diregistrasi dengan jumlah cagar budaya yang berhasil diregistrasi	77 %
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata	Perbandingan antara jumlah WBTB yang di ajukan untuk dipatenkan dengan jumlah WTB yang berhasil dipatenkan	100%

Sumber Data : Disdikbud

2.3 Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2025 mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan Tahun 2025 meliputi 5 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 8 indikator kinerja beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (*cascading*) mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (85)
2	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	96%
3	Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,59 Tahun
		Rata- Rata Lama Sekolah	9,04 Tahun
4	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional	3 orang
		Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional	5 orang
5	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata	77 %
		Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata	100%

Sumber Data : Disdikbud Tahun 2025

Tabel 2.3.
 Anggaran Akhir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	617.857.426.525	APBD
2	Pengelolaan Pendidikan	136.373.976.002	APBD & DAK
3	Program pendidik dan tenaga kependidikan	328.191.321	APBD
4	Program pengembangan kebudayaan	3.464.825.915	APBD
5	Program pengembangan kesenian tradisional	84.532.900	APBD
6	Program pembinaan sejarah	213.505.850	APBD
7	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	805.663.687	APBD
Jumlah		759.128.122.200	

Sumber Data : Laporan Bulanan Disdikbud Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja Tahun 2025

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Tabel hasil pengukuran kinerja yang mana untuk penilaian tabel hasil pengukuran kinerja yang mana untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan /
Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2025

Urutan	Klasifikasi Penilaian	Predikat
I	85% - 100%	Sangat Baik
II	69% - 84%	Baik
III	53% - 68%	Cukup Baik
IV	<53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, dan berdaya saing	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	A (85)	A(80,04)*	94,16
		Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Angka	96,00	91,00	94,79
		Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Persen	13,59	13,38	98,45
			Rata- Rata Lama Sekolah (tahun)	Persen	9,04	9,06	100,22
		Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional (orang)	Orang	3	5	166,67
			Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional (orang)	Orang	5	5	100,00
2	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata	Persen	77	75	97,40
			Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata	Persen	100	100	100,00
Rata-rata capaian (%)							106,46

Sumber: Disdikbud ,BPS Tahun 2025

Ket : *) Data Realisasi Tahun 2024

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 ini ada 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target A (85), realisasi A(80,04) atau capaian sebesar 94,16% dengan

- predikat **sangat baik**, capaian ini masih capaian tahun 2024 karena penilaian AKIP untuk tahun 2025 belum keluar, biasanya keluar pada bulan april/mei tahun 2026;
2. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target 96, realisasi 91 atau capaian sebesar 94,79% dengan predikat **sangat baik** tetapi capaian ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan;
 3. Harapan lama sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target 13,59 tahun, realisasi 13,38 tahun atau capaian sebesar 98,45% dengan predikat **sangat baik**, tetapi capaian ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan;
 4. Rata-rata lama sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target 9,04 tahun, realisasi 9,06 tahun atau capaian sebesar 100,22% dengan predikat **sangat baik**, capaian ini lebih besar dari target yang telah ditetapkan;
 5. Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target 3 orang, realisasi 5 orang, capaian persentase sebesar 166,67% dengan predikat **sangat baik**, capaian ini melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kualitas dan daya saing guru serta efektivitas pembinaan dan pengembangan profesional guru yang dilaksanakan.
 6. Jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target 5 orang, realisasi 5 orang atau capaian sebesar 100% dengan predikat **sangat baik**, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan prestasi peserta didik berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
 7. Persentase cagar budaya teregister menjadi tujuan wisata dengan target 77%, realisasi 75% atau capaian sebesar 97,40% , dengan predikat **sangat baik**;
 8. Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata dengan target 100%, realisasi 100% atau capaian sebesar 100%, dengan predikat **sangat baik**.

Capaian rata-rata ke 8 (delapan) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 106,46% dengan predikat **sangat baik**.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.



SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Tanpa Satuan	A (85)	A(80,04)*	94,16*
Rata-rata capaian (%)						94,16*

Sumber : Inspektorat 2024

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2024

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian		
			2023	2024	2025
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	A (83,71)	A (80,04)	A (80,04)*

Sumber : Inspektorat 2024

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2024

Pada indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan (AKIP) terdapat penurunan capaian dari nilai A(84) pada tahun 2023 menjadi A(80,04) pada tahun 2024 dan untuk sementara sama pada tahun 2025 karena nilai AKIP tahun ini belum keluar. Penurunan capaian dari tahun 2023 ke 2024 ini disebabkan bukan karena satu dokumen, tetapi karena kinerja tidak terkelola secara utuh dari perencanaan-pelaksanaan-pengukuran-pelaporan-evaluasi. Tetapi kita masih menunggu realisasi capaian tahun 2025.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Akhir Periode Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026	% Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A (80,04)*	A(89)	89,93*

Sumber : Inspektorat 2024

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2024

Pada tabel 3.5. dapat dilihat realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 adalah A(80,04), sementara target akhir periode renstra yaitu A(89), atau tingkat kemajuan sebesar 89,93%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6.

Perbandingan Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab.PESSEL	Realisasi Dinas Pendidikan Prov. SUMBAR	Realisasi Kemendikbudristek
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tanpa Satuan	A (80,04)*	BB (78,98)	BB(79,59)

Sumber : Disdikbud Kab, Disdik Prov.Sumbar dan Kemendikbudristek
Ket: *) Data Tahun 2024

Pada tabel 3.6. dapat dilihat bahwa realisasi indikator Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah A (80,04), ini lebih tinggi dari pada Realisasi Nilai AKIP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Kemendikbudristek yang hanya mendapatkan nilai BB (78,98) dan BB(79,59).

Diharapkan peningkatan capaian ini akan terus berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya dengan menjaga komitmen manajemen yang tinggi dalam organisasi dan menerapkan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes*.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

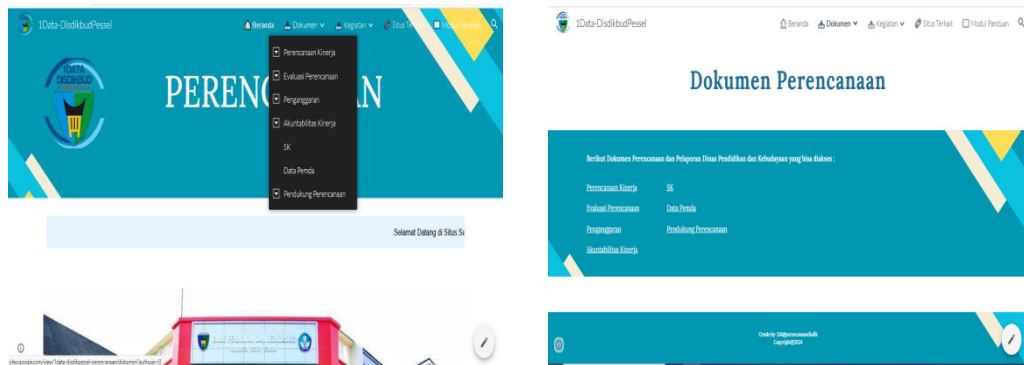
1. Perencanaan Kinerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan

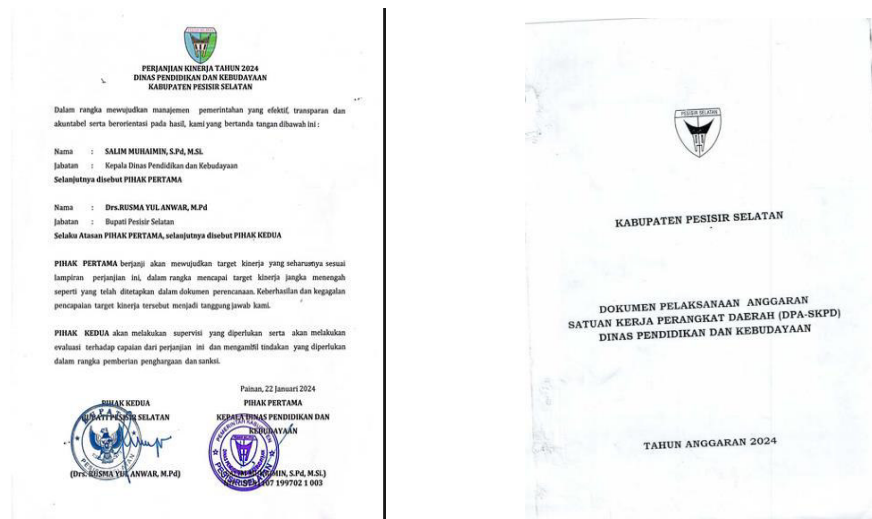
menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- d. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada situs web "SatuData-DisdikbudPessel" (<https://sites.google.com/view/1data-disdikpessel-perencanaan/>) dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3.1. Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Situs Web Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 3.2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

2. Pengukuran Kinerja

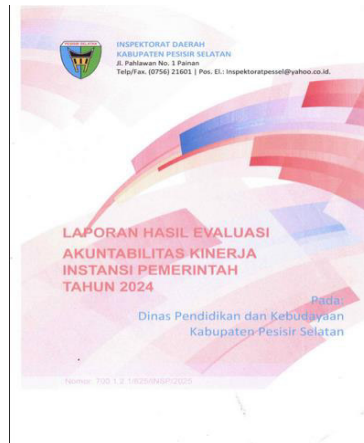
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.3 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi dan Cover Laporan Kinerja yang telah disusun serta cover Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 3.3. Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan Bagian Organisasi



Gambar 3.4. Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2024*

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 3.5 dibawah ini :



Gambar 3.5.
Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.7
Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
1	Nilai AKIP	Tanpa Satuan	A (85)	A (80,04)*	94,16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	617.857.426.525	556.334.272.608	90,04	0,04

Sumber : Disdikbud Tahun 2025

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2024

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,04%. Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah A (85), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 sebesar A (80,04) serta untuk capaian kinerja sebesar 94,16%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 4,9% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar A (84).

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu

- 1) Perencanaan Kinerja
 - a. Agar tujuan dalam Renstra dilengkapi dengan ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja Tujuan) serta target kinerja yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevance, time bound);
 - b. Agar setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).

2) Pengukuran Kinerja

- a. Agar IKU memuat formulasi atau cara mengukur indikator kinerja atas indikator sasaran yang akan dicapai untuk semua indikator sasaran kinerja;
- b. Agar pengukuran kinerja dilakukan secara berkala. Pengukuran kinerja (notulen hasil monitoring pencapaian kinerja/realisasi rencana aksi), memuat informasi tentang realisasi, capaian, hambatan dan saran/solusi perbaikan atas pencapaian rencana aksi;
- c. Agar capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya terhadap semua sasaran;
- d. Agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

3) Pelaporan Kinerja

Agar informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya.

4) Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar pemantauan capaian kinerja dilakukan pendalaman yang memadai pada unit kerja/individu dengan menyajikan target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan dan rekomendasi dan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

7. Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.556.334.272.608,- atau 90,04% dari total anggaran sebesar Rp. 617.857.426.525,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,04%.



SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	96,00	91,00	94,79
Rata-rata capaian (%)						94,79

Sumber : BapedalitbangTahun 2025

Dari Tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah 91,00 dari target 96,00 atau tingkat capainnya mencapai 94,79%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu "**Pronasa**", dengan predikat tinggi yang sudah tahap implementasi dan Inovasi **Siguru** masih perlu perbaikan nilai kematangan inovasi.

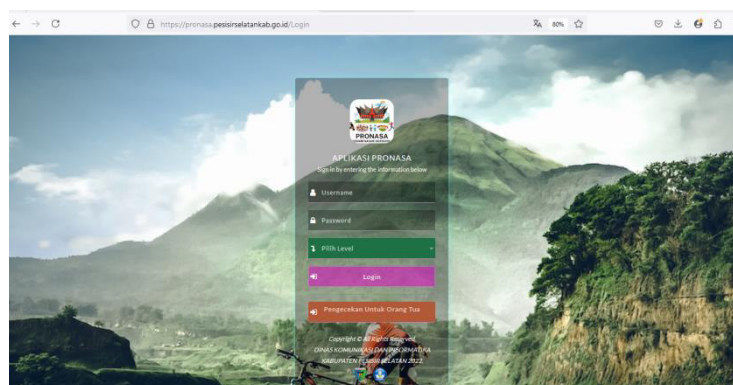
a. Inovasi PRONASA

Inovasi ini dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang pada tahapan Implementasi. Tujuan inovasi ini menyediakan strategi pengembangan diri siswa yang terpadu pada kegiatan komunitas di nagari, terhubung dengan guru-guru sekolah sebagai pengendali pelaksanaannya.

Sehingga pembentukan karakter siswa, prestasi dan peningkatan daya saing, berlangsung berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan dasar. Hasil dari inovasi ini adalah

1. Pembentukan karakter siswa;

2. Prestasi peserta didik tahun 2025 menunjukkan capaian yang membanggakan baik di bidang akademik maupun nonakademik, di mana pada bidang nonakademik Muhammad Merzidan, siswa SDN 27 Pasar Kambang, meraih Juara III Kejuaraan Nasional Tenis Lapangan di Tanah Datar Tahun 2025 dan Juara III Kejuaraan Nasional Tenis Lapangan Semen Padang Tahun 2025, sementara Arysad Ar Rasyid juga berhasil memperoleh Juara III Kejuaraan Nasional TDP Tenis Lapangan Semen Padang Tahun 2025, serta Afthar Ifri Alhanan dari UPT SDN 39 Pasar Gompong meraih Juara I (Medali Emas) Kategori Usia VI nomor 20 meter gaya dada pada Kejuaraan Renang Golden Black Open Swimming Championship II se-Sumatera yang diselenggarakan di Kolam Renang Teratai Kota Padang pada tanggal 19–20 September 2025, sedangkan pada bidang akademik Muhammad Hasbi Alfarisqi, siswa SDN 23 Painan Utara, berhasil meraih prestasi tertinggi sebagai Absolute Winner Kompetisi Sains Ruang Guru Tahun 2025, yang secara keseluruhan mencerminkan keberhasilan pembinaan pendidikan yang seimbang antara pengembangan kemampuan intelektual dan bakat minat peserta didik.

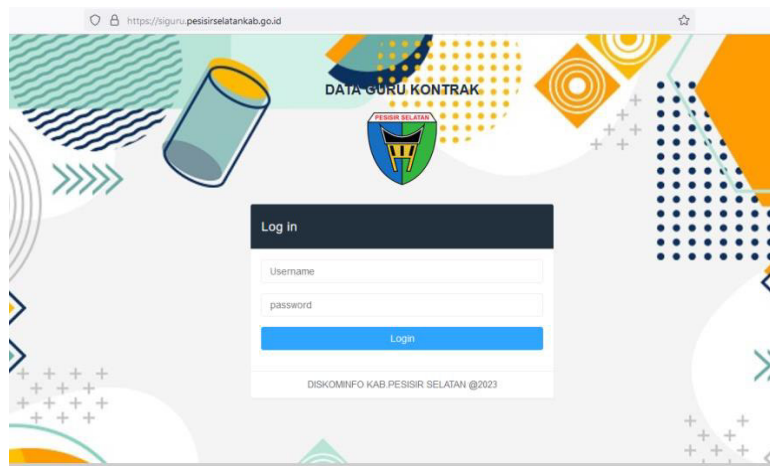


Gambar 3.6
Tampilan Website Aplikasi Pronasa

b. Inovasi SIGURU

Inovasi ini dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang pada tahapan Implementasi . Inovasi dilaksanakan oleh Bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan mempermudah pengadministrasian


pembayaran gaji guru kontrak di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil dari inovasi ini adalah dengan penggunaan Aplikasi siguru.pesisirselatankab.go.id. mempermudah dalam mengadministrasikan bahan pembayaran Gaji Guru Kontrak.



Gambar 3.7

Tampilan Website Aplikasi SiGuru

Pada Gambar 3.8 dibawah ini dapat dilihat Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2025 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PESIIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. H.Agus Salim Nomor 1 Pailan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25611
Telepon : (0756) 21313 Faksimila (0756) 22253
Laman <https://pesisirselatankab.go.id> P04-W Pesisir@pesisirselatankab.go.id

Pesisir Selatan, 0 Januari 2026


Nomor : 500.10.30.1/4/Bapedalibang/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2025**

Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD M. Zein Pailan
3. Direktur RSUD Pratama Tapan
4. Kepala UPT Puskesmas
se Kabupaten Pesisir Selatan
di Tempat

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2025, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 56,75 dengan Presikat **KABUPATEN INOVATIF**. Berdasarkan hal tersebut, dapat diformasikan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah melaporkan inovasi sebanyak 95 inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah, RSUD dan UPT Puskesmas. Selanjutnya, inovasi daerah yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Innovative Government Award (IGA) adalah sebanyak 32 Inovasi (rincian terlampir).

Berkenaan dengan hal di atas, hasil pelaporan Inovasi Daerah tahun 2025 agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi Perangkat Daerah, RSUD dan UPT Puskesmas sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIIR SELATAN,

ZAINAL ARIFIN, SKM, M.KES

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil Validasi	Nomor Registrasi (Kemendagri)
1	2	3	4	5	6	7
12.	RSUD Dr. M.Zein Pailan	PAHAWATA, Pemuda dan Olahraga	menjadi kewenangan Daerah	91.00	Tenorm	13.01-113700-2023
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DOXA PESONA (Donor Caring ke Pesisir Negeri) Program Nagan Bersedekah	Inovasi pelayanan publik	91.00	Tenorm	13.01-33705-2023
		SIGURU	Inovasi pelayanan publik	78.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
14.	Dinas Perikanan dan Pangan	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Sematkan)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Ususan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	91.00	Tenorm	13.01-137109-2024
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	LAGI FRAL (LAYANAN DIGITAL FILM LITERASI DAN INKLUSI SOSIAL)	Inovasi pelayanan publik	91.00	Tenorm	13.01-142761-2024
16.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	e-Rakompli (Elektronik Rekomendasi Penelitian)	Inovasi pelayanan publik	99.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
		SUCUP	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	38.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	POJOK USAHA MIKRO PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PESIIR SELATAN (POJOK LUMI FILUT PESSEL) CETAK SENDIRI KARTU AKI ONLINE (TAKSKU ONLINE)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Ususan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	97.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
			Inovasi pelayanan publik	92.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-

Dokumen ini telah dibentangkan secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSI), dalam Sistem dan Sandi Hoşun (S2SH).

Gambar 3.8. Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2025

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa

tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	94	94	91

Sumber : BapedalitbangTahun 2025

Berdasarkan realisasi indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi PD pada sasaran meningkatnya kualitas Inovasi Daerah menunjukkan capaian yang relatif tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan, di mana pada tahun 2023 dan 2024 nilai kematangan inovasi berada pada angka 94, kemudian pada tahun 2025 menurun menjadi 91, namun demikian capaian tersebut tetap mencerminkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan inovasi di perangkat daerah masih berada pada kategori baik, sehingga secara umum kualitas inovasi daerah tetap terjaga dan mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026	% Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	91	100	91,00

Sumber : BapedalitbangTahun 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, realisasi Nilai Kematangan Inovasi PD pada sasaran meningkatnya kualitas Inovasi Daerah pada tahun 2025 mencapai angka 91, dari target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100, sehingga tingkat kemajuan yang dicapai adalah 91,00 persen, kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja inovasi daerah telah berjalan dengan baik dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target Renstra, meskipun masih diperlukan penguatan dan optimalisasi upaya inovasi agar target akhir dapat terpenuhi secara maksimal.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena tidak ditemukan Data Inovasi Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Kemdikbudristek tahun 2025 di website.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 menargetkan nilai kematangan inovasi sebesar 100 , sementara penilaian yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan nilai 91,00 atau capaian sebesar 91,00%, berarti belum mencapai target yang ditetapkan, karena belum adanya kesepakatan MoU dari Kabupaten lain untuk mengadopsi aplikasi "Pronasa", karena hanya baru sebatas studi banding ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk kedepannya kita harus meningkatkan kualitas dari tahun sebelumnya, dengan cara mempublikasikan aplikasi "Pronasa" ke luar pemerintahan kabupaten Pesisir Selatan, agar nantinya mereka dapat mereplikasi aplikasi Pronasa di Kabupaten/kotanya masing-masing.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.11
Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
1	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100	91	91,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	617.857.426.525	556.334.272.608	90,04	0,01

Sumber : Disdikbud dan Bapedalitbang Tahun 2025

Dari Tabel 3.12 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,01%. Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun berikutnya adalah :

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
3. Manajemen inovasi; dan
4. Keberlanjutan inovasi.

7. Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.556.334.272.608,- atau 90,04% dari total anggaran sebesar Rp. 617.857.426.525,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,01%.



SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Akses Pendidikan

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Akses Pendidikan, indikator kinerjanya yaitu Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.12. dibawah ini :

Tabel 3.12
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Akses Pendidikan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	13,59	13,38	98,45
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,04	9,06	100,22
Rata-rata capaian (%)						99,34

Sumber : Disdikbud dan BPS Tahun 2025

Dari Tabel 3.12. di atas dapat dilihat bahwa Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Akses Pendidikan Tahun 2025, terlihat bahwa capaian kinerja berada pada kategori sangat baik. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) ditargetkan sebesar 13,59 tahun dan terealisasi 13,38 tahun, dengan tingkat capaian mencapai 98,45 persen. Sementara itu, indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan kinerja melampaui target, dengan realisasi sebesar 9,06 tahun dari target 9,04 tahun atau capaian sebesar 100,22 persen. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator mencapai 99,34 persen, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan lama sekolah	13,36	13,37	13,38
		Rata-rata lama sekolah	8,58	8,81	9,06

Sumber : BPS Tahun 2025

Dari Tabel 3.13 di atas dapat dilihat bahwa Capaian sasaran *Meningkatnya Akses Pendidikan* menunjukkan tren yang relatif positif selama periode 2023–2025. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat naik pada angka 13,36 tahun pada 2023 menjadi angka 13,37 tahun 2024, dan meningkat lagi menjadi 13,38 tahun pada 2025. Kondisi ini menggambarkan bahwa secara umum harapan penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan telah berada pada level setara pendidikan menengah atas, meskipun laju peningkatannya masih terbatas.

Sementara itu, indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dan konsisten. RLS meningkat dari 8,58 tahun pada 2023, menjadi 8,81 tahun pada 2024, dan kembali naik menjadi 9,06 tahun pada 2025. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga mendekati jenjang kelas IX (SMP akhir), serta mencerminkan adanya perbaikan akses dan keberlanjutan pendidikan dari tahun ke tahun. Peningkatan capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Akses pendidikan yang semakin luas;
- b. Dukungan pembiayaan pendidikan (BOS, PIP, Beasiswa Prestasi);
- c. Kesadaran dan motivasi masyarakat;
- d. Penurunan angka putus sekolah;

- e. Kualitas layanan pendidikan membaik;
- f. Kebijakan dan program pemerintah daerah yang tepat sasaran;
- g. Faktor sosial-ekonomi keluarga yang mengalami peningkatan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.14 dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026	% Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan lama sekolah	13,38	13,35	100,22
		Rata-rata lama sekolah	9,06	8,29	109,29

Sumber : Disdikbud dan BPS Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, pada sasaran meningkatnya akses pendidikan tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik, di mana harapan lama sekolah terealisasi sebesar 13,38 dari target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 13,35 dengan tingkat kemajuan 100,22 persen, sementara rata-rata lama sekolah mencapai 9,06 dari target 8,29 dengan tingkat kemajuan 109,29 persen, capaian ini menggambarkan bahwa akses dan keberlanjutan pendidikan masyarakat telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra serta mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pendidikan yang dilaksanakan.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Jumlah Guru Berprestasi Tingkat Provinsi atau Nasional dan Jumlah Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi atau Nasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

N O	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab.PESSEL	Realisasi Dinas Pendidikan Prov. SUMBAR	Realisasi Kemendik budristek
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	13,38	14,30	13,21
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,06	9,44	8,85

Sumber : BPS Tahun 2025

Pada tabel 3.15 dapat dilihat bahwa realisasi indikator Harapan lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah 13,38 Tahun, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah 14,30 Tahun, dan Kemdikbudristek adalah 13,21 Tahun. Realisasi indikator Rata-rata lama sekolah Kabupaten pesisir selatan adalah 9,06 Tahun, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 9,44 Tahun, dan Kemdikbudristek 8,85 Tahun. Berarti realisasi capaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berada dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan diatas Kemdikbudristek.

a. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Berikut rumus perhitungan Harapan Lama Sekolah :

Harapan Lama Sekolah : Jumlah penduduk usia 7 sampai 18 Tahun yang Bersekolah

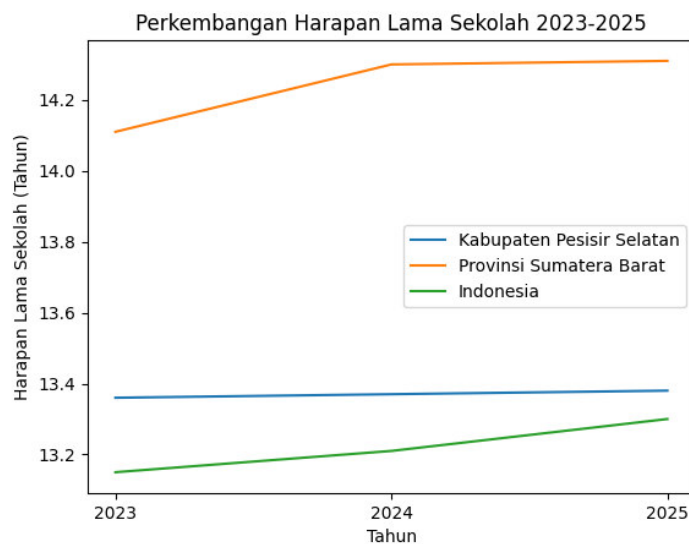
Jumlah penduduk usia 7 sampai 18 Tahun 2025

Tabel 3.16.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir
selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia
Tahun 2023-2025

No	Wilayah	2023	2024	2025
1	Kabupaten Pesisir Selatan	13,36	13,37	13,38
2	Provinsi Sumatera Barat	14,11	14,30	14,31
3	Indonesia	13,15	13,21	13,30

Sumber Data: BPS Tahun 2025

Grafik 3.1. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2023-2025



Sumber Data: BPS Tahun 2025

Dari grafik 3.1. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan tingkat nasional. Kabupaten Pesisir Selatan mencatat HLS sebesar 13,36 tahun pada 2023, meningkat menjadi 13,37 tahun pada 2024 dan 13,38 tahun pada 2025, yang menunjukkan adanya perbaikan akses dan kesempatan pendidikan meskipun dengan kenaikan yang masih terbatas. Di tingkat provinsi, Sumatera Barat mencatat capaian yang lebih tinggi, yakni 14,11 tahun pada 2023, meningkat cukup signifikan menjadi 14,30 tahun pada 2024 dan 14,31 tahun pada 2025. Sementara itu, secara nasional HLS Indonesia juga mengalami peningkatan dari 13,15 tahun pada 2023 menjadi 13,21 tahun pada 2024 dan 13,30 tahun pada 2025. Secara komparatif, capaian

Kabupaten Pesisir Selatan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat, namun relatif sejalan dan sedikit di atas rata-rata nasional pada awal periode, sehingga diperlukan upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan Harapan Lama Sekolah di daerah.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir.

Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun.

Langkah-langkah penghitungannya adalah sebagai berikut:

a) Dari data mikro yang digunakan, seleksi penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

b) Hitung lamanya sekolah setiap penduduk berumur 25 tahun ke atas tersebut.

Jika partisipasi sekolahnya adalah tidak/belum pernah bersekolah, maka lama sekolahnya adalah 0. Jika partisipasi sekolahnya adalah masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka lama sekolahnya mengikuti rumus berikut.

Rumus mencari Rata-rata Lama Sekolah :

Rata-rata lama sekolah :
$$\frac{\text{Lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas}}$$

Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

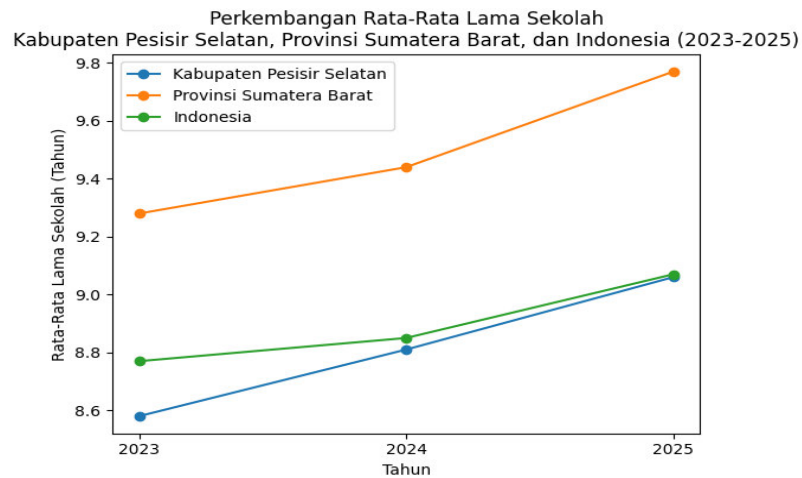
Tabel 3.17.

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia Tahun 2023-2025

No	Wilayah	2023	2024	2025
1	Kabupaten Pesisir Selatan	8,58	8,81	9,06
2	Provinsi Sumatera Barat	9,28	9,44	9,77
3	Indonesia	8,77	8,85	9,07

Sumber : BPS Tahun 2025

Grafik 3.2. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023-2025



Dari grafik 3.2. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023–2025 menunjukkan tren meningkat di seluruh wilayah. Kabupaten Pesisir Selatan naik dari 8,58 tahun (2023) menjadi 9,06 tahun (2025), Provinsi Sumatera Barat dari 9,28 menjadi 9,77 tahun, dan Indonesia dari 8,77 menjadi 9,07 tahun. Pada tahun 2025, capaian Kabupaten Pesisir Selatan hampir setara dengan nasional, meskipun masih di bawah rata-rata provinsi.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja adalah dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, dan peningkatan aksesibilitas.

Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

- Tersedianya pemerataan layanan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah;
- Tersedianya program Indonesia pintar;
- Tersedianya dana operasional sekolah.
- Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi dasar siswa;

Untuk peningkatan akses pendidikan upaya yang telah dilakukan yaitu :

- Merehabilitasi dan melengkapi sarana dan prasarana sekolah
- Membangun dan memperbaiki jalan dan jembatan ke lokasi sekolah
- Membuka rute kendaraan umum untuk melintasi lokasi sekolah

- Menyediakan bus sekolah gratis bagi siswa (Bus Pronasa)

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.18.
Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
1	Harapan lama sekolah	Tahun	13,59	13,38	98,45	Program Pengelolaan Pendidikan	136.373.976.002	80.808.033.484	59,25	0,41
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,04	9,06	100,22					
Rata-rata capaian (%)			11,32	11,22	99,34					

Sumber : Disdikbud dan BPS Tahun 2025

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,41%.

7. Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Disamping alokasi anggaran, ditetapkan pula program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Program utama yang menunjang ketercapaian ini adalah program Pengelolaan Pendidikan, dengan Kegiatan pengelolaan pendidikan dasar dan kegiatan Pengelolaan pendidikan menengah pertama, dengan detail sub kegiatan sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 1 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 4 Pengadaan Mebel Sekolah
- 5 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 6 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 7 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 8 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 9 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 10 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 11 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- 12 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
- 13 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- 14 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 15 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- 16 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
- 17 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
- 18 Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 20 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- 21 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 23 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- 24 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 2 Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 3 Pembangunan Laboratorium
- 4 Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan sekolah
- 5 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 6 Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas Sekolah
- 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- 12 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 13 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- 14 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 15 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 16 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 17 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
- 18 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 19 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 20 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 21 Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SMP

3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 2 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- 3 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD
- 4 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- 5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 6 Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 7 Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Bidang Pendidikan PAUD

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- 1 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan
- 2 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- 3 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 4 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah adalah sebesar Rp. 80.808.033.484,- atau 59,25% dari total anggaran sebesar Rp. 136.373.976.002,-, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,41%.



SASARAN STRATEGIS 4 **Meningkatnya Daya Saing Pendidikan**

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Daya Saing, indikator kinerjanya yaitu Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional dan Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.19 dibawah ini :

Tabel 3.19
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Daya Saing Pendidikan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional (orang)	Orang	3	5	166,67
		Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi	Orang	5	5	100,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
		atau nasional (orang)				
Rata-rata capaian (%)						133,33

Sumber : Disdikbud Tahun 2025

Dari Tabel 3.19 di atas dapat dilihat bahwa kinerja yang dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional melampaui target yang ditetapkan, dari target 3 orang terealisasi sebanyak 5 orang atau mencapai 166,67 persen, yang mencerminkan meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik. Sementara itu, indikator jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional telah memenuhi target secara optimal, yaitu dari target 5 orang terealisasi 5 orang atau mencapai 100 persen. Dengan demikian, rata-rata capaian indikator pada sasaran strategis ini mencapai 133,33 persen, yang menandakan bahwa upaya peningkatan daya saing pendidikan pada Tahun 2025 berjalan sangat efektif dan melebihi ekspektasi yang telah ditetapkan.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Daya Saing Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.20 dibawah ini :

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
1	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional (orang)	3	2	5
		Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional (orang)	4	4	5

Sumber : Disdikbud Tahun 2025

Dari Tabel 3.20 di atas dapat dilihat bahwa capaian jumlah guru dan siswa berprestasi tingkat provinsi maupun nasional menunjukkan perkembangan yang positif. Jumlah guru berprestasi tercatat sebanyak 3 orang pada tahun 2023, menurun menjadi 2 orang pada tahun 2024, namun meningkat signifikan menjadi 5 orang pada tahun 2025, yang mencerminkan semakin optimalnya pembinaan kompetensi dan dukungan terhadap pengembangan profesionalisme guru. Sementara itu, jumlah siswa berprestasi relatif stabil pada 4 orang di tahun 2023 dan 2024, kemudian meningkat menjadi 5 orang pada tahun 2025, menandakan keberhasilan satuan pendidikan dalam pembinaan potensi peserta didik secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan yang semakin kuat dari tahun ke tahun.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional dan Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.21 dibawah ini :

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional (orang)	5	3	66,67	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
		Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional (orang)	5	4	100,00	Sudah tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Disdikbud Tahun 2025

Pada tabel 3.21 dapat dilihat Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi, capaian sasaran Meningkatkan Daya

Saing Pendidikan menunjukkan hasil yang positif. Pada indikator jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional, realisasi tahun 2025 tercatat sebanyak 5 orang dibandingkan target akhir Renstra 2021–2026 sebanyak 3 orang, dengan persentase capaian 66,67 persen dan tingkat kemajuan dikategorikan akan tercapai. Sementara itu, indikator jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional telah mencapai realisasi 5 orang dari target 4 orang, dengan persentase capaian sebesar 100 persen, sehingga dinyatakan sudah tercapai. Capaian ini menggambarkan komitmen dan efektivitas upaya pembinaan serta pengembangan prestasi pendidik dan peserta didik dalam rangka meningkatkan daya saing pendidikan secara berkelanjutan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sumber daya manusia adalah penentu utama kegagalan atau keberhasilan dari kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu solusi yang selalu diupayakan untuk mengangkat kinerja yaitu dialog kinerja yang dilakukan antara pimpinan dan bawahan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.22.
Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
1	Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional (orang)	Tahun	3	5	166,67	Program Pengelolaan Pendidikan dan	2.422.847.863	2.327.846.856	94,33	0,25

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
	Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional (orang)	Tahun	5	5	100,00	Program pendidikan dan tenaga kependidikan	48.038.071	2.913.000		
Rata-rata capaian (%)			4	5	133,34		2.470.885.934	2.330.759.856		

Sumber : Disdikbud Tahun 2025

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,25%.

6. Analisis Program/Kegagalan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Disamping alokasi anggaran, ditetapkan pula program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Program utama yang menunjang ketercapaian ini adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan Program, dengan Kegiatan pengelolaan pendidikan dasar dan kegiatan Pengelolaan pendidikan menengah pertama, dengan detail sub kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan

A.program pengelolaan pendidikan

1.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 1 Pembinaan Minat,Bakat, dan Kreatifitas Siswa
- 2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

2.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

3.Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- 1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

B.PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional dan Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional adalah sebesar Rp. 257.816.455,- atau 88,89% dari total anggaran sebesar Rp. 290.025.170,-, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,18%.



SASARAN STRATEGIS 5 Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Daerah, indikator kerjanya yaitu Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata dan Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.23 dibawah ini :

Tabel 3.23
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata	%	77	75	97,40
		Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata	%	100	100	100,00
Rata-rata capaian (%)						98,70

Sumber : Disdikbud Tahun 2025
Ket : *) Data realisasi Tahun 2024

Dari Tabel 3.23 di atas dapat dilihat bahwa Persentase cagar budaya teregister yang menjadi tujuan wisata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah 75% dari target 77% atau tingkat capainnya mencapai 97,40% dan Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi tujuan wisata adalah 100% dari target 100% atau tingkat capaiannya mencapai 100,00% dengan rata-rata capaian sebesar 100% dengan predikat **Sangat Baik**.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.24 dibawah ini :

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
1	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata	75,00	75,00	75,00
		Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata	100,00	100,00	100,00

Sumber : Disdikbud Tahun 2025
Ket : *) Data realisasi Tahun 2023

Dari Tabel 3.22 di atas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata adalah 75,00% dan Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata adalah 100%, sama dengan tahun sebelumnya karena data masih dalam proses oleh bidang kebudayaan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata dan Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.25 dibawah ini :

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata	75	80	93,75	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
		Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata	100	95	105,26	Sudah tercapai (lebih dari 100%)

Sumber : Disdikbud Tahun 2025

Dari Tabel 3.25 di atas dapat dilihat bahwa Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata hampir mencapai target yaitu 75% dari 80 % target dan Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata melebihi dari target akhir yaitu 100% dari 95% target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata dan Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sumber daya manusia adalah penentu utama kegagalan atau keberhasilan dari kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu solusi yang selalu diupayakan untuk mengangkat kinerja yaitu dialog kinerja yang dilakukan antara pimpinan dan bawahan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.26.
Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
1	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata	%	77	75	97,40	Program Pengembangan Kebudayaan	3.464.825.915	1.304.132.323	37,64	0,65
						Program pengembangan kesenian tradisional	84.532.900	801.414	0,95	
	Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata	%	100	100	100,00	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	805.663.687	275.018.573	34,14	
						Program pembinaan sejarah	213.505.850	1.364.050	0,64	
Rata-rata capaian (%)			88,50	87,50	98,70		4.568.528.352	1.581.316.360	35,89	

Sumber : Disdikbud Tahun 2025

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2024

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,65%.

7. Analisis Program/Kegagalan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Disamping alokasi anggaran, ditetapkan pula program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

Program utama yang menunjang ketercapaian ini adalah program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan detail sub kegiatan sebagai berikut :

Program Pengembangan Kebudayaan	
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan
2	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
3	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
1	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
Program Pembinaan Sejarah	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
2	Perlindungan Cagar Budaya
3	Pengembangan Cagar Budaya
4	Pemanfaat Cagar Budaya

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata adalah sebesar Rp. 1.304.933.737,- atau 19,29% dari total anggaran sebesar Rp. 3.549.358.815,-, dan indikator Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata adalah sebesar Rp. 276.382.623,- atau 17,39% dari total anggaran sebesar Rp. 1.019.169.537,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,65%.

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.27.
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program /
 Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	617.857.426.525	556.334.272.608	90,04
2	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah			
3	Meningkatnya Akses Pendidikan	136.702.167.323	80.871.757.748	39,34
4	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan			
5	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	4.568.528.352	1.581.316.360	18,34
Total		759.128.122.200	638.787.346.716	84,15

Sumber : Disdikbud Tahun 2025

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 697.040.995.348,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp593.482.370.291,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 85,14 %.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, yaitu :

1. Capaian Sasaran

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sebanyak 5 (lima) sasaran, 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026. Secara umum satu sasaran strategis sudah mencapai target, namun ada tiga sasaran yang belum sesuai target tetapi hampir tercapai yaitu : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, Meningkatnya Akses Pendidikan (1 indikator), dan Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah (1 indikator).

2. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 8 yaitu : Nilai AKIP, Nilai Kematangan Inovasi, Harapan Lama sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional, Jumlah Siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional, Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata, Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata. Secara umum sebagian capaian indikator sudah mencapai target, namun ada sebagian lagi yang belum mencapai target yaitu : Nilai Kematangan Inovasi PD, Harapan lama sekolah, dan Persentase cagar budaya teregister yang menjadi tujuan wisata.

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 638.787.346.716,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 84,15% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 759.128.122.200,-. Dari 5 (lima) sasaran strategis, Capaian realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Sasaran strategis " Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja dan Meningkatnya kualitas inovasi daerah sebesar 90,04%, mencerminkan efektivitas pelaksanaan belanja penunjang operasional perangkat daerah, diikuti oleh Sasaran strategis "Meningkatnya Akses Pendidikan"

dengan capaian 59,25% yang masih memerlukan peningkatan optimalisasi, khususnya pada pemanfaatan sumber dana APBD dan DAK. Selanjutnya, capaian menengah dicatat oleh Sasaran strategis “Meningkatnya Daya Saing Pendidikan” sebesar 19,42% dan capaian terendah terdapat pada Sasaran strategis “Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah” sebesar 18,34%, yang mengindikasikan adanya kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga memerlukan evaluasi dan perbaikan pada periode selanjutnya.

4.2 Saran

1. Untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2021-2026 diperlukan kolaborasi semua stakeholder terkait melalui crosscutting program/ kegiatan;
2. Untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta indikator, maka diperlukan perencanaan program/ kegiatan yang tepat, akurat, efisiensi, dan efektif berdasarkan *Outcome* yang ingin dicapai mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Dalam penyusunan program/ kegiatan sebaiknya disusun terlebih dahulu kerangka acuan kerja dan petunjuk operasional kegiatan, sehingga efisiensi waktu pelaksanaan dan capaian realisasi anggaran dapat diwujudkan;
4. Dalam penentuan target indikator sasaran sebaiknya mengacu pada ketersediaan sumber daya yang tersedia baik anggaran maupun sumber daya manusia;
5. Dalam penentuan target indikator sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada defenisi operasional dan cara/ rumus untuk menghitung indikator tersebut, sehingga target yang ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sampai ke staf selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Lampiran : Penghargaan 2025

A. Guru Berprestasi



*Penghargaan Terbaik I Kategori Kepala TK Transformatif
Dalam Ajang Apresiasi GTK Tahun 2025*



*Penghargaan Terbaik III Kategori Guru SD Transformatif
Dalam Ajang Apresiasi GTK Tahun 2025*



*Penerima Penghargaan Rohana Kudus dan Pembicara Kelas Pendidik
dalam Ajang TPN XII Tahun 2025*



Penerima Penghargaan Award Ki Hajar Dewantara (KHD), dan Pembicara Kelas Pendidik dan Pemimpin dalam Ajang TPN XII Tahun 2025



Penerima Penghargaan Sebagai Kiper Futsal dalam Ajang PORNAS KORPRI XII Tahun 2025

B. Murid Berprestasi



*Penghargaan Kompetensi Sains Ruang Guru 2025 Tahun 2025
Diraih oleh MUHAMMAD HASBI ALFARISQI - Absolute Winner*



*Kejuaraan Nasional Tenis Lapangan di Tanah Datar Tahun 2025
Diraih oleh MUHAMMAD MERZIDAN- Peringkat III*



*Kejuaraan Nasional TDP Tenis Lapangan Semen Padang 2025-
Diraih oleh MUHAMMAD MERZIDAN dan ARYSAD AR RASYID - Peringkat III*



*Kejuaraan Renang Golden Black Open Swimming Championship II se-SUMATERA Tahun 2025
Diraih oleh AFTHAR IFRI ALHANAN- Peringkat I EMAS K.U VI 20 M GAYA DADA*

Lampiran : Perjanjian Kinerja 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.SI.**
 Jabatan : **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs.RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**
 Jabatan : **Bupati Pesisir Selatan**
 Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 22 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI PESISIR SELATAN



(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



(SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.SI)
07 199702 1 003

Dipindai dengan CamScanner

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi PD	100%
3	Meningkatnya Akses Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	13,53
		2 Rata-rata Lama Sekolah	8,6
4	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	1. Jumlah guru berprestasi tingkat propinsi atau nasional	3 Orang
		2 Jumlah Siswa berprestasi tingkat propinsi atau nasional	5 Orang
5	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	1. Persentase Cagar Budaya terregistrasi yang Menjadi Tujuan Wisata	77%
		2. Persentase WFTB yang dipatenkan menjadi Tujuan Wisata	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemungutan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 564.513.185.884	-
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 148.115.316.780	-
3	Program pengembangan Kurikulum	Rp. 247.456.000	-
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 1.277.711.994	-
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Jumlah	Rp. 714.285.425	-
		Rp. 714.969.936.083	-

Painan, 22 Januari 2024



(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)



(SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.SI)
07 199702 1 003